

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Telaah penelitian terdahulu adalah salah satu acuan atau landasan teoritis penelitian yang digunakan untuk mengkaji topik permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desa yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (*hinterland*) di Kawasan Agropolitan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, peneliti menelaah beberapa penelitian terkait dengan topik tersebut.

Gulo (2015), meneliti tentang Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang berpotensi atau berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias dan menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (*growth centre*) dan daerah belakangnya (*hinterland*) kecamatan pendukung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis skalogram untuk mengetahui pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan, dan analisis gravitasi untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi pusat pertumbuhan wilayah dibandingkan lokasi lain atau wilayah belakangnya (*hinterland*). Hasil analisis menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan utama di Kabupaten Nias adalah Kecamatan Gido, pusat pertumbuhan kedua, yaitu Kecamatan Idanogawo, dan pusat pertumbuhan ketiga adalah Kecamatan Botomuzoi.

Fitrayati (2011), meneliti tentang Alternatif Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Di Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) III, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk menentukan kecamatan pusat pertumbuhan baru dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, aksesibilitas, daya dukung dan keterkaitan antar kecamatan di wilayah SSWP III. Analisis yang digunakan adalah tipologi *klassen*, *Location Quotient* (LQ), *shift share* dan analisis skalogram. Berdasarkan hasil analisis tipologi *klassen* dan teori kutub pertumbuhan, Kecamatan Tulangan dan

Kecamatan Jabon berpeluang untuk menjadi pusat pertumbuhan, jika ditinjau dari arah kebijaksanaan pengembangan wilayah SSWP III yaitu sektor industri dan pertanian. Dalam hal ini, Kecamatan Tulangan memiliki sektor sektor unggulan industri, sedangkan Kecamatan Jabon memiliki sektor unggulan pertanian. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan teori pusat pertumbuhan, jika Kecamatan Tulangan yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan, maka akan lebih cepat berkembang sebagai pusat pertumbuhan secara alamiah. Hal ini dikarenakan semua sektor ekonomi memiliki keuntungan kompetitif, infrastruktur dan aksesibilitas juga tersedia sehingga memiliki daya tarik bagi industri untuk tumbuh dan berkembang. Jika Kecamatan Jabon yang dipilih sebagai pusat pertumbuhan, maka membutuhkan lebih banyak peran pemerintah dalam perencanaan wilayah. Hal ini dikarenakan daya tariknya rendah, karakteristik aktivitas ekonomi berada dengan Kecamatan porong, bauran industri negatif, tetapi memiliki empat sektor ekonomi dengan keuntungan kompetitif.

Ardila (2012), meneliti tentang Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecamatan-kecamatan yang sebagai pusat pertumbuhan, interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan *hinterlandnya*, kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis yang digunakan adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas, metode gravitasi, analisis tipologi *klassen* dan analisis *Location Quotient* (LQ). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 6 kecamatan yang termasuk kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok dan Susukan. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan *hinterlandnya* berbeda-beda. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relatif tertinggal. Rata-rata sektor basis menyebar secara merata di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Putra (2015), meneliti tentang Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Di Eks. Karesidenan Besuki. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari pusat pertumbuhan di wilayah Eks. Karesidenan Besuki untuk mengetahui sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di masing-masing wilayahnya, untuk mengetahui dampak pengganda dari sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif pada masing-masing wilayahnya, untuk mengetahui daya tarik pusat pertumbuhan terhadap wilayah *hinterlandnya*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis skalogram, analisis *shift share* klasik dan analisis gravitasi. Berdasarkan hasil analisis skalogram pusat pertumbuhan di wilayah Eks. Karesidenan Besuki terletak di Kabupaten Jember yang mempunyai jumlah fasilitas terbesar yaitu 59.052 unit. Keunggulan lainnya Kabupaten Jember memiliki 10 jenis fasilitas yang unggul dari jenis fasilitas yang dijadikan objek penelitian.

Hasil analisis *shift share* klasik menunjukkan Kabupaten Jember mempunyai delapan keunggulan kompetitif, Kabupaten Banyuwangi mempunyai enam keunggulan kompetitif, Kabupaten Bondowoso mempunyai enam keunggulan kompetitif dan Kabupaten Situbondo mempunyai tiga keunggulan kompetitif. Perhitungan pengganda, pendapatan pada setiap sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif menunjukkan sektor listrik, gas dan air bersih yang memiliki pendapatan pengganda terbesar di Kabupaten Jember dengan nilai 118,278, sektor bangunan menjadi pengganda pendapatan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 114,509, sedangkan Kabupaten Bondowoso mempunyai sektor listrik, gas dan air bersih yang memiliki nilai pengganda pendapatan dengan nilai 147,926 dan pengganda pendapatan terbesar di Kabupaten Situbondo terdapat sektor jasa-jasa dengan nilai 11,586. Berdasarkan analisis gravitasi Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan mempunyai daya tarik yang cukup karena memiliki nilai T_{ij} (daya tarik) yang selalu meningkat tiap tahunnya. Daya tarik yang paling kuat terjadi antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso. Daya tarik paling lemah terjadi antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi.

Ermawati (2010), meneliti tentang Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan di Kabupaten Karanganyar, seberapa besar interaksi antara kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya (*hinterland*-nya), posisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi unggulan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis skalogram dan indeks sentralitas, analisis gravitasi/interaksi, analisis tipologi *klassen* dan analisis LQ (*Location Quotient*). Hasil penelitian berdasarkan alat analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat tujuh kecamatan yang mempunyai hirarki dengan kategori tinggi keatas sebagai pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Gondangrejo. Angka interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya *hinterlandnya* berbeda-beda, selain itu juga terdapat hubungan/interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan pusat pertumbuhan. Berdasarkan analisis tipologi *klassen* rata-rata tahun 2004-2008, tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar posisi perekonomiannya berada pada daerah yang relatif tertinggal kecuali Kecamatan Jaten, Kebakramat dan Kecamatan Jenawi. Sektor Pertanian meliputi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor jasa-jasa merupakan sektor basis/unggulan dominan yang sebagian besar terdapat di 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan Sektor Pertambangan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa merupakan sektor basis/unggulan yang hanya terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu di atas, penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi sebagai pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (*hinterland*). Selain itu, persamaan dari penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan yakni metode analisis skalogram. Sementara, perbedaan dari penelitian ini terletak pada penggunaan ketersediaan sarana

dan prasarana dalam pengembangan Kawasan Agropolitan. Ketersediaan sarana dan prasarana yakni sarana sosial (seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan rekreasi), sarana ekonomi (seperti pasar, kios pasar, warung makan, toko-toko, lembaga keuangan dan industri pertanian), sarana umum (seperti telekomunikasi, jaringan listrik dan air bersih), sarana pemerintahan (seperti kantor kepala desa, kesos, trantib dan linmas), aksesibilitas antar kawasan (seperti transportasi dan ketersediaan jalan) dan daerah non basis pengembangan komoditas pertanian.

2.2 Tinjauan Pengembangan Wilayah

2.2.1 Definisi Pengembangan Wilayah

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi dkk (2011), wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayahnya saling berinteraksi satu sama lain secara fungsional. Adapun komponen-komponen wilayah tersebut mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, wilayah dapat diartikan sebagai suatu unit geografis yang membentuk suatu kesatuan yang menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lain yang ada didalam suatu batasan unit tertentu.

Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan bagian penting pembangunan pada suatu daerah terutama diperdesaan karena pengembangan wilayah pada dasarnya berupaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian hidup pada suatu wilayah. Oleh karena itu, pengembangan wilayah ini sangat dibutuhkan untuk mengkaji kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik dan geografis secara terpadu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan wilayah, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah antara lain:

- a. Sebagai *growth center*, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun juga harus memperhatikan sebaran atau pengaruh (*spred effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
- b. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi pusat persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
- c. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
- d. Pada pengembangan wilayah terdapat mekanisme pasar juga harus menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan wilayah.

Tujuan dari pengembangan wilayah ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yakni dengan menciptakan pusat-pusat produksi, kemudahan terhadap akses prasarana, pelayanan logistik dan lain sebagainya (Triutomo, 2011). Sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang optimal dapat meningkatkan kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan (Anwar, 2001). Oleh karena itu, menurut Hariyanto dan Tukidi (2007) untuk mewujudkan konsep pengembangan wilayah, maka dilakukan melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari:

1. Proses perencanaan tata ruang, dimana pada prosesnya akan menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga interaksi antar manusia dan lingkungannya berjalan dengan seimbang dan tercapainya kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.
2. Proses pemanfaatan ruang, yakni wujud pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2.2.2 Faktor-Faktor Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah mengacu pada perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Hal ini dikarenakan,

pengembangan wilayah adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup suatu wilayah. Ketimpangan wilayah yang dimaksud adalah adanya ketidakmerataan pendapatan dan hubungan saling memperlemah dalam suatu wilayah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah menurut Handayani (2005) meliputi:

- a. Faktor Fisik
Faktor fisik terdiri dari struktural alam, yaitu kondisi topografi tanah, ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat dan aksesibilitas kawasan baik di dalam maupun yang menghubungkan antar kawasan.
- b. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi meliputi keadaan dengan pusat kota, penyediaan lapangan kerja dan keberadaan pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti pasar, perkotaan dan perbankan.
- c. Faktor Sosial
Faktor sosial meliputi ketersediaan pusat kegiatan masyarakat, keamanan lingkungan dan meningkatnya penghasilan.
- d. Faktor Eksternal Kawasan
Faktor eksternal kawasan meliputi investasi swasta, keterkaitan dengan kawasan lain.

2.3 Tinjauan Konsep Agropolitan

Secara harafiah, agropolitan berasal dari dua kata yaitu agro dan politan (polis), dimana agro berarti pertanian dan politan berarti kota. Dengan demikian agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu mengacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Mahi, 2014). Menurut Adisasmita (2006), agropolitan sebagai “kota diladang” yang pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan. Petani atau masyarakat

dapat memperoleh pelayanan dalam rangka kegiatan produksi dan pemasaran ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya.

Konsep agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Douglas dan Friedmann pada tahun 1978 sebagai strategi untuk mengembangkan perdesaan dari masalah ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal (Baladina dkk, 2013). Proses interaksi kedua wilayah selama ini secara fungsional ada dalam posisi yang saling memperlemah. Hubungan kedua wilayah yang saling memperlemah ini akan berdampak pada penurunan produktivitas wilayah (Rustiadi dkk, 2006).

Iqbal dan Anugrah (2003) menjelaskan bahwa konsep agropolitan didasarkan pada pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri di negara berkembang (di Asia) yang mengakibatkan terjadinya beberapa kecenderungan antara lain:

- a. Terjadinya *hyper urbanization*, sebagai akibat terpusatnya penduduk di kota-kota yang padat;
- b. Pembangunan modern hanya terjadi di beberapa kota saja, sementara daerah pinggiran relatif tertinggal;
- c. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi;
- d. Pembagian pendapatan yang tidak merata (kemiskinan);
- e. Kekurangan bahan pangan, akibat perhatian pembangunan selalu tercurah pada percepatan pertumbuhan sektor industri (*rapid industrialization*);
- f. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (petani);
- g. Terjadinya ketergantungan pada dunia luar.

Konsep agropolitan juga terdapat agropolitan distrik, yaitu suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5-10 km dengan jumlah penduduk 50-150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa/km² serta kota pertanian dengan jumlah penduduk 10.000-25.000 jiwa dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat imigrasi ke kota. Jasa-jasa dan pelayanan yang telah tersedia disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat (Mahi, 2014).

Pelayanan dapat berupa akses permodalan, akses pasar, infrastruktur, kelembagaan keuangan, kelembagaan penyuluhan, pertanian dan pelayanan sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka agropolitan merupakan konsep pembangunan yang mensinergiskan pembangunan sektor pertanian diperdesaan dengan sektor sektor industri dengan mengoptimalkan komoditas unggulan pertanian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Melalui konsep agropolitan, maka dapat memudahkan petani atau masyarakat dalam mendapatkan pelayanan baik dalam produksi, pemasaran, serta sarana dan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari.

2.4 Tinjauan Kawasan Agropolitan

2.4.1 Definisi Kawasan Agropolitan

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penataan Ruang, kawasan didefinisikan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara, kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan agropolitan merupakan kawasan perdesaan yang secara fungsional kegiatan utamanya adalah sektor pertanian (Rustiadi dkk, 2007). Disebut kawasan perdesaan karena terdapat sentra produksi atau kawasan agribisnis serta kota pertanian yang saling berkaitan, yang memiliki fasilitas pendukung berkembangnya sistem agribisnis. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1, kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Menurut Mahi (2014), kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terbentuk oleh sistem fungsional desa-

desa yang ditunjukkan oleh adanya hirarki keruangan desa, yakni dengan adanya pusat agropolitan (*central place*) dan desa-desa di sekitarnya (*hinterland*).

Kawasan agropolitan memiliki kriteria yang harus dipenuhi menurut Mahi (2014), yaitu mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan, mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang, memiliki dampak sosial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku, memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif, memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal.

Dari pemaparan di atas dijelaskan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan perdesaan. Disebut kawasan perdesaan karena terdapat sentra produksi atau kawasan agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional desa-desa yang ditunjukkan oleh adanya hirarki keruangan desa, yakni dengan adanya pusat agropolitan (*central place*) dan desa-desa di sekitarnya (*hinterland*).

2.4.2 Struktur Kawasan Agropolitan

Berdasarkan pengertian kawasan agropolitan, diketahui bahwa komponen utama agropolitan adalah kota tani dan daerah sentra produksi pertanian. Kota tani merupakan pusat desa dan pusat pelayanan bagi desa-desa sekitarnya (*hinterland*). Kota tani dapat berupa Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan atau Kota Perdesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pembangunan perdesaan di desa-desa sekitarnya (*hinterland*). Kota tani, sebagai pusat desa ditetapkan dengan pertimbangan ketersediaan sarana prasarana serta kegiatan agribisnisnya. Menurut Rosdiana dkk (2013) struktur kawasan agropolitan berdasarkan aspek tata ruang adalah sebagai berikut:

a. Ordo Pertama (Kota Tani Utama).

Kota tani utama berfungsi sebagai kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah (nasional dan internasional) dan memiliki pelabuhan samudera apabila berada ditepi pantai. Kota sebagai pusat berbagai kegiatan *manufacturing final*

industri pertanian (*packing*), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas. Kota sebagai pusat berbagai kegiatan tertier agrobisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan dan kota pusat sebagai pelayanan (*general agroindustry services*).

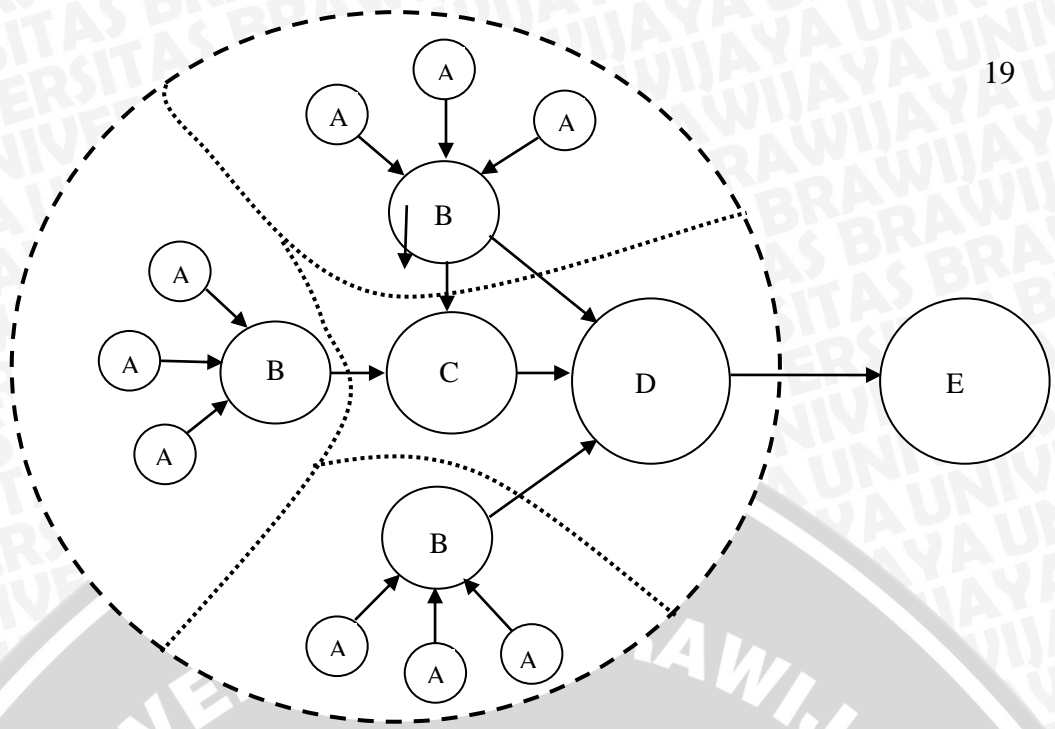
b. Ordo Kedua (Pusat Distrik Agropolitan atau Kota Tani)

Pusat distrik agropolitan atau kota tani berfungsi sebagai pusat perdagangan perwilayahan yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis, sebagai pusat kegiatan agroindustri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agrobisnis dan pusat pelayanan agroindustri khusus, pendidikan, pelatihan, dan pemuliaan tanaman unggulan.

c. Ordo Ketiga (Pusat Satuan Kawasan Pertanian atau *Hinterland*)

Pusat satuan kawasan pertanian berfungsi sebagai pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian, pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri, pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas, pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan pemukiman pertanian dan sebagai koperasi dan informasi pasar barang perdagangan.

Mengacu pada struktur umum yang telah dipaparkan, maka akan membentuk hierarki pasar dalam kawasan agropolitan. Hierarki tersebut terdiri dari pasar pengumpul yang terletak di *hinterland*, pasar pelayanan internal yang terletak di kota tani serta pasar pelayanan eksternal yang terletak di kota tani utama (Sunaryanto dkk, 2011). Berikut ini disajikan sketsa kawasan agropolitan yang menggambarkan keterkaitan antara kota tani dan *hinterland* yang dikutip dari Mahi (2014).



Gambar 1. Pola Keterkaitan Kawasan Agropolitan

Keterangan:

- A : Penghasil Bahan Baku
- B : Pengumpul Bahan Baku
- C : Sentra Produksi
- D : Kota Kecil/Pusat Regional
- E : Kota Sedang/Besar (Pasar/Outlet)
- : Jalan dan dukungan sarana dan prasarana
- : Batas kawasan lindung, budidaya
- - - : Batas Kawasan agropolitan

Menurut Mahi (2014), kawasan agropolitan meliputi pusat agropolitan (*central place*) dan desa-desa di sekitarnya (*hinterland*). Pada sistem agropolitan, kegiatan utama di pusat agropolitan (*central place*) atau dikenal sebagai Desa Pusat Pertumbuhan adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) secara teknis perencanaan tata ruang agropolitan merupakan kota tani dan kota tani utama. Desa Pusat Pertumbuhan berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, dan pusat pemasaran. Suatu kawasan ditetapkan sebagai *central place* atau Desa Pusat Pertumbuhan apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Merupakan kesatuan perkampungan, sebagai pusat distribusi produk, jasa dan informasi.
2. Memiliki potensi wilayah lahan kering yang cukup datar dan luas dengan penggunaan lahan dominan pertanian.
3. Adanya akses yang memadai antar desa dalam kawasan maupun ke pusat pertumbuhan lain.
4. Adanya kelembagaan yang berjalan dengan baik.

Lain halnya dengan daerah *hinterland* yang merupakan desa-desa di sekitar Desa Pusat Pertumbuhan. Pada dasarnya *hinterland* berfungsi sebagai pusat produksi pertanian, intensifikasi pertanian, pusat pendapatan pertanian, pusat permintaan produk dan jasa pertanian, serta pusat diversifikasi pertanian (Mahi, 2014). Adanya keterikatan keruangan antara Desa Pusat Pertumbuhan dan *hinterland* dalam kawasan agropolitan, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal tersebut dipacu oleh pergerakan arus modal, barang, jasa, informasi serta manusia antar desa dalam kawasan agropolitan serta pasar di kota.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, apabila dilihat secara internal maka kawasan agropolitan terdiri dari kota tani dan desa-desa sentra produksi pertanian (*hinterland*). Kawasan agropolitan dapat meliputi satu desa atau kelurahan, kecamatan, beberapa kecamatan dalam suatu lingkup kabupaten atau kota atau dapat pula wilayah perbatasan kabupaten atau kota. Sementara itu, secara eksternal kawasan agropolitan memiliki keterkaitan dengan daerah kota yang skalanya lebih besar. Keterkaitan tersebut penting untuk memperluas jangkauan pasar serta sebagai penarik investor untuk berinvestasi di Kawasan Agropolitan.

2.4.3 Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terbentuk oleh sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan oleh adanya hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat agropolitan (*central place*) dan desa-desa di sekitarnya (*hinterland*). Oleh karena itu kawasan agropolitan harus memiliki ciri-ciri yang ideal. Ciri-ciri yang harus dimiliki

kawasan agropolitan apabila sudah berkembang menurut Muliaanggun (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian kegiatan masyarakat di kawasan agropolitan di dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
 - 1) Subsistem usahatani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.
 - 2) Subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup mesin, peralatan pertanian pupuk dan lain-ain.
 - 3) Subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi industri-industri pengolahan dan pemasarannya termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
 - 4) Subsistem jasa-jasa pendukung (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti perkreditan, asuransi, transportasi, penelitain dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
- b. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (*urban-rural linkage*) yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.
- c. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan agropolitan di dominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.

- d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan sama dengan suasana kehidupan di perkotaan karena prasarana dan infrastruktur yang ada dikawasan tersebut diusahakan tidak jauh berada dengan di kota.

2.4.4 Persyaratan Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang telah terpilih dan berkembang karena memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sistem agribisnisnya. Suatu kawasan dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan apabila kawasan itu memiliki komoditas pertanian dan produk olahan pertanian unggulan, memiliki daya dukung dan potensi dukungan sarana dan prasarana (Baladina dkk, 2013). Menurut Muliaanggung (2002) suatu wilayah juga dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
- b. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang ingin dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan agropolitan secara mandiri.
- d. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

2.5 Tinjauan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan) melalui keterkaitan desa dan kota (*urban-rural linkages*). Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang disekitarnya membentuk kawasan agropolitan (Soenarno, 2003). Menurut Suwandi (2005), pengembangan kawasan agropolitan merupakan suatu pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan pertanian dengan mensinergiskan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya pertanian industri yang berdaya saing dan berkelanjutan yang di gerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Melalui sistem dan usaha agribisnis diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat atau petani baik dari segi teknis budidaya, modal kerja, informasi pasar hingga fasilitas penunjang lainnya, sehingga efisiensi dan efektivitas produksi dapat tercapai.

Menurut Rivai (2003), tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota. Bekembangnya pertanian industri nantinya tidak hanya membangun usaha budidaya (*on farm*) saja tetapi juga pengolahan hasil pertanian (*off farm*), yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengembangan kawasan agropolitan, ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengembangan kawasan agropolitan menurut Mahi (2014), yaitu:

1. Prinsip kerakyatan, yaitu pembangunan kawasan agropolitan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Prinsip swadaya yang berarti fasilitas yang diberikan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.
3. Prinsip kemitraan, yaitu memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

4. Prinsip berkelanjutan, artinya pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan sesuai potensi pengembangan dan kemampuan masyarakat sekitar dengan memperhatikan lingkungan hidup.

Prinsip-prinsip ini melibatkan banyak pihak dalam pengembangan kawasan agropolitan. Pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pengembangan kawasan agropolitan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

2.6 Tinjauan Teori Pusat Pertumbuhan

2.6.1 Definisi Teori Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan merupakan perkembangan dari teori kutub pertumbuhan yang pertama kali dikemukakan oleh Perraoux (1950) seorang ahli ekonomi yang berasal dari Perancis. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menentukan lokasi menjadi pusat pertumbuhan adalah dengan menggunakan pendekatan Perraoux (1950). Dalam teorinya, Perraoux (1950) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi, pertumbuhan itu akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Pertumbuhan tersebut akan mempercepat peningkatan suatu daerah sehingga membangun beberapa pusat kegiatan ekonomi di titik lokasi (pusat). Titik lokasi (pusat) akan memberikan pengaruh pada daerah disekitarnya sehingga dapat menarik dan mendorong perkembangan ekonomi.

Menurut Sihotang (2001) pusat pertumbuhan terjadi dikarenakan adanya keuntungan aglomerasi (pemusatan dalam lokasi tertentu) yang didapat dari keputusan untuk berlokasi pada tempat yang terkonsentrasi. Keuntungan aglomerasi ini didapat karena adanya keuntungan skala yang berasal dari antara lain fasilitas-fasilitas perbankan, sosial, pemerintahan, pasar tenaga kerja dan perusahaan jasa-jasa tertentu. Sehingga, para investasi akan lebih tertarik untuk berinvestasi didaerah aglomerasi yang menyebabkan industri-industri menjadi terpusat didaerah ini terutama industri inti. Industri inti mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah (Adisasmita, 2005).

Menurut Tarigan (2014) pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan merupakan suatu kelompok usaha atau kegiatan ekonomi yang terfokus pada suatu daerah dan memiliki sifat yang dinamis sehingga mampu mempengaruhi perekonomian suatu daerah dan daerah belakangnya. Dengan adanya kelompok usaha atau kegiatan ekonomi yang terfokus pada suatu daerah merupakan karakteristik utama dalam pusat pertumbuhan. Sedangkan, secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan akses sehingga menjadi daya tarik bagi berbagai macam usaha untuk berlokasi didaerah tersebut meskipun tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Dengan demikian, pusat pertumbuhan memiliki potensi dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah yang mampu mendorong perekonomian daerah belakangnya (*hinterland*).

Menurut Nasoetion (1985) kutub atau pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan atau industri-industri atau kelompok-kelompok perusahaan dan industri. Kelompok-kelompok perusahaan dan industri yang berkembang dalam suatu wilayah akan mendorong aktivitas ekonomi pada wilayah belakangnya (*hinterland*). Sehingga, perkembangan pusat pertumbuhan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan efek pada wilayah belakangnya (*hinterland*) yakni efek penyebaran (*spread effect*). Akan tetapi pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan melalui investasi besar pada sektor industri mengakibatkan wilayah perkotaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga terjadi pengurasan sumber daya secara besar yang tidak seimbang dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sektor industri hanya difokuskan atau dikembangkan sebagian besar di daerah perkotaan. Sementara wilayah perdesaan sebagai wilayah sentra produksi pertanian yang mengalami ketinggalan pembangunan dari wilayah perkotaan. Padahal wilayah perdesaan memiliki peranan penting terhadap penyediaan sumber daya pertanian sebagai bahan baku bagi industri. Oleh karena itu, dalam penerapan konsep kutub atau pusat pertumbuhan diharapkan terjadinya efek penyebaran (*spread effect*) yang luas ke wilayah belakang (*hinterland*). Terjadinya efek penyebaran (*spread effect*) yang merata dalam

pembangunan nantinya akan membentuk alternatif lokasi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan pada wilayah tersebut (Jocom dkk, 2009).

2.6.2 Ciri-Ciri Pusat Pertumbuhan

Menurut Tarigan (2014), pusat pertumbuhan memiliki 4 (empat) ciri-ciri, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Jadi, kehidupan kota menjadi sebuah irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

- b. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor-sektor yang saling berkaitan dan mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat untuk sektor tersebut (sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan wilayah belakangnya.

- c. Adanya konsentrasi geografis

Konsentrasi dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan juga menciptakan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut akan mendapatkan fasilitas berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya.

d. Bersifat mendorong wilayah kebelakangnya

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Berdasarkan ciri-ciri pusat pertumbuhan diatas, kegiatan ini akan dianggap sebagai pusat pertumbuhan apabila dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam (diantara berbagai sektor dikota) maupun ke luar (ke wilayah belakangnya).

2.6.3 Peranan Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan berperan sebagai pendorong perekonomian wilayah belakangnya (Hestuadiputri, 2007). Dengan ditetapkannya peran suatu lokasi menjadi pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di wilayah belakangnya (*hinterland*). Adapun peranan pusat pertumbuhan menurut Hestuadiputri (2007) antara lain:

1. Sebagai pusat industri dari daerah yang dilayani, sehingga harus memiliki fasilitas untuk kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian (*agroindustry*) dan fasilitas umum.
2. Sebagai acuan untuk menahan proses migrasi, yaitu menampung penduduk dari luar pusat pertumbuhan tersebut dan menyediakan lapangan pekerjaan.
3. Sebagai penarik terhadap pusat pertumbuhan yang lebih besar.
4. Membantu distribusi barang (barang jadi dan setengah jadi) dan hasil pertanian dari pusat pelayanan yang lebih kecil.

2.6.4 Indikator Dalam Penentuan Lokasi Pusat Pertumbuhan

Dalam menentukan lokasi pusat pertumbuhan, upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melaksanakan pembangunan daerah perdesaan. Pembangunan daerah perdesaan dilakukan dengan memilih desa atau kawasan desa yang memiliki potensi dan kemampuan pertumbuhan yang relatif kuat dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya. Desa yang memiliki potensi dan kemampuan pertumbuhan akan

diberikan fungsi sebagai pusat pertumbuhan yang disebut sebagai Desa Pusat Pertumbuhan. Desa pusat pertumbuhan merupakan pusat pelayanan kecil yang memiliki hubungan secara langsung terhadap ekonomi, sosial dan geografis dengan sebagian besar penduduk di kawasan perdesaan. Pusat pelayanan kecil tersebut akan menjadi penghubung dengan daerah-daerah perdesaan lainnya. Disebut pusat pelayanan kecil karena memiliki fasilitas pasar, distribusi, aksesibilitas, sarana dan prasarana dan jasa kemasyarakatan lainnya yang mampu melayani keseluruhan pelosok desa. Adanya desa yang terpilih menjadi pusat pelayanan atau pertumbuhan tersebut diharapkan mampu mendorong desa-desa belakangnya (*hinterland*) untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Oleh karena itu, lokasi yang menjadi yang memiliki berbagai jenis fasilitas pelayanan serta aksesibilitas yang memadai maka berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Semakin banyak jenis dan jumlah fasilitas pelayanannya dan semakin baik aksesibilitasnya maka semakin potensial lokasi tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan (Adisasmita, 2013).

Mengacu pada penetapan kawasan agropolitan, salah satu syarat suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan adalah adanya daerah pusat pertumbuhan yang dapat mengembangkan kawasan agropolitan. Oleh karena itu, perlu diketahui indikator-indikator apa saja yang diperlukan dalam menentukan pusat pertumbuhan untuk mempengaruhi pengembangan suatu kawasan agropolitan, sehingga ke depannya dapat diupayakan peningkatan potensi akan indikator-indikator tersebut. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat pertumbuhan disesuaikan dengan kriteria Kawasan Agropolitan menurut Mahi (2014) sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam keberlanjutan pertanian, industri dan kegiatan produksi lainnya (Edyanto, 1989). Selain itu, penduduk juga merupakan unsur penggerak yang dapat mendorong pengembangan program agropolitan (Rosdiana dkk, 2013). Sama halnya dalam menentukan lokasi pusat pertumbuhan membutuhkan indikator pendukung dalam pertumbuhan kawasan seperti jumlah dan

kepadatan penduduk masing-masing wilayah atau desa. Jumlah dan kepadatan penduduk dapat menggambarkan efisiensi penggunaan ruang dan distribusi penduduk. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk di suatu pusat, maka semakin efisien penggunaan ruang dan merata distribusinya dan semakin banyak jumlah fasilitas serta jenis fasilitas pada suatu pusat. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat bertambah akan cenderung mengakibatkan penambahan jumlah fasilitas dan jumlah jenis fasilitas yang semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, minimnya jumlah dan kepadatan penduduk akan mengakibatkan keterbatasan dalam mendukung pertumbuhan kawasan. Sehingga, kurangnya efisiensi penggunaan ruang dan tidak merata distribusinya (Budiharsono, 2001).

2. Ketersediaan infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pada suatu wilayah sangat mempengaruhi dalam pengembangan kawasan agropolitan (Nugroho, 2008). Hal tersebut dikarenakan ketersediaan infrastruktur merupakan indikator dalam upaya permasalahan pembangunan di perdesaan (Arsyad dkk, 2011). Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sebagai modal dasar untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi masyarakat serta menghubungkan antar wilayah (BAPPENAS, 2010). Sama halnya dalam penentuan lokasi pusat pertumbuhan, melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan mendorong peningkatan berbagai kegiatan daerah tersebut dan menghidupkan perekonomian. Selain itu akan menciptakan pusat pertumbuhan bagi masyarakat sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat serta terciptanya keterkaitan antar kawasan Agropolitan. Oleh karena itu, wilayah dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai akan menciptakan pusat pertumbuhan, akan tetapi wilayah dengan sarana dan prasarana kurang baik dan belum memadai akan cenderung menciptakan daerah tertinggal (Novrilasari, 2008). Dukungan infrastruktur untuk menciptakan pusat pertumbuhan dapat diwujudkan dalam peran ketersediaan sarana dan prasarana yakni sarana ekonomi (pasar, lembaga keuangan dan industri), sarana sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan dan rekreasi), sarana umum

(telekomunikasi, jaringan listrik dan air bersih), sarana pemerintahan (kantor kepala desa dan lain-lain) serta aksesibilitas antar kawasan (seperti transportasi dan ketersediaan jalan). Semakin banyak fasilitas yang dimiliki pusat pertumbuhan maka akan menjadi daya tarik bagi daerah belakangnya (*hinterland*).

3. Daerah Basis Pengembangan Komoditas Pertanian

Indikator penunjang lain dalam menentukan pusat pertumbuhan adalah adanya daerah basis pengembangan komoditas pertanian. Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan apabila wilayah tersebut memiliki komoditas unggulan pertanian (Baladina dkk, 2013). Oleh karena itu kawasan agropolitan hendaknya memiliki komoditi unggulan pertanian yang banyak diminta pasar serta sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Sehingga adanya daerah basis komoditi pertanian pada suatu wilayah akan dapat mencapai tujuan pembangunan dan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dalam penelitian ini, desa yang menjadi daerah basis pengembangan komoditas pertanian dikategorikan menjadi daerah belakang (*hinterland*) dan daerah yang bukan menjadi basis komoditas pertanian dikategorikan menjadi daerah pusat pertumbuhan. Hal tersebut dikarenakan daerah belakang (*hinterland*) berfungsi sebagai pusat produksi pertanian, intensifikasi pertanian, pusat pendapatan pertanian, pusat permintaan produk dan jasa pertanian, serta pusat diversifikasi pertanian. Sedangkan pusat pertumbuhan berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, dan pusat pemasaran (Mahi, 2014). Sehingga, semakin basis daerah tersebut dalam suatu wilayah maka daerah belakang (*hinterland*) akan semakin mampu meningkatkan pertumbuhan wilayah (Fitrayati, 2011).

2.7 Tinjauan Daerah Belakang (*Hinterland*)

Daerah belakang (*hinterland*) merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana wilayahnya kurang atau tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi atau kemiskinan dan bidang pendidikan atau keterbelakangan (Ditjen

Cipta karya, 2011). Menurut BAPPENAS (2004), daerah terbelakang (*hinterland*) adalah wilayah perdesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat lainnya. Akan tetapi, daerah belakang (*hinterland*) berfungsi sebagai pemasok (produsen) bahan-bahan mentah atau bahan baku, pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan penjaga fungsi-fungsi keseimbangan ekologis (Pribadi, 2005). Sedangkan, menurut Febriyani dkk, (2014) daerah belakang (*hinterland*) merupakan kota kecil yang berada disekitar kota besar yang memiliki kesamaan dalam pola kinerja dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di daerah belakang (*hinterland*) tetap memiliki kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan atau fasilitas-fasilitas lain namun dalam skala kecil dan tidak kompleks seperti kota besar atau pusat kota. Secara ekonomi, daerah belakang (*hinterland*) dapat menjalankan perekonomian secara mandiri meskipun dalam pendistribusian beberapa barang dan jasanya masih tergantung pada kota besar, akan tetapi daerah belakang (*hinterland*) dapat memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat atau penduduk *sub-urban* (masyarakat pinggiran kota).

Berdasarkan pemaparan diatas, daerah belakang (*hinterland*) merupakan wilayah perdesaan yang memiliki masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan aksesibilitas yang berada disekitar pusat pertumbuhan yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah pusat. Akan tetapi, daerah belakang (*hinterland*) berfungsi sebagai pemasok bahan baku bagi dan pemasok tenaga kerja sehingga dapat dipandang sebagai wilayah yang memiliki peran strategis dalam mendukung suatu pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya keterikatan antara Desa Pusat Pertumbuhan dan daerah belakang (*hinterland*) dalam kawasan agropolitan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan kemudahan aksesibilitas.

2.8 Analisis Skalogram

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan pusat pertumbuhan dapat dilakukan melalui metode skalogram. Metode skalogram merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan mengetahui hirarki pusat-pusat pengembangan dan sarana prasarana pembangunan yang ada pada setiap daerah. Fasilitas pelayanan yang dimaksud seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan pemerintahan yang tersedia di wilayah tersebut. Tujuan dari penggunaan analisis ini adalah untuk mengetahui tempat-tempat yang dapat dijadikan tempat pusat pertumbuhan serta wilayah pengaruhnya (*hinterland*). Melalui, metode skalogram ini akan memberikan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana wilayah dari yang paling banyak sampai sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pertumbuhan. Dengan kata lain, wilayah yang memiliki peringkat tertinggi akan menjadi pusat pertumbuhan. Hal ini dianggap bahwa wilayah paling atas memiliki kemampuan pelayanan yang tinggi dan seterusnya menurun sampai pada wilayah kelompok bawah (Muta'ali, 2015).

2.9 Hirarki Pusat Pertumbuhan

Hirarki adalah peringkat atau tingkatan wilayah. Peringkat atau tingkatan wilayah akan menentukan pusat pertumbuhan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan. Diperlukan adanya hirarki dikarenakan tidak semua daerah bersifat homogenitas, akan tetapi terdapat perbedaan dalam persebaran penduduk maupun luas wilayahnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui tingkat hirarki suatu daerah sehingga dapat dilihat apa yang dibutuhkan oleh daerah dan kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk daerah tersebut (Sihotang, 2001). Penentuan hirarki wilayah disusun berdasarkan persebaran jumlah penduduk, fasilitas pelayanan dan aksesibilitas yang digunakan melalui metode analisis skalogram (Muta'ali, 2015). Dengan adanya hirarki wilayah maka diharapkan akan terjadi keterkaitan antar wilayah yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan (Khan, 2013). Menurut Jati (2015), hirarki

wilayah dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan disebar sesuai hirarki atau yang dikenal dengan orde. Adapun orde-orde tersebut antara lain:

1. Pusat pertumbuhan primer (orde satu)

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu adalah pusat pertumbuhan utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat menarik pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multifungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya. Hal tersebut sesuai dengan struktur kawasan agropolitan. Dalam struktur kawasan agropolitan, orde pertama disebut sebagai kota tani utama. Kota tani utama yang berfungsi sebagai kota perdagangan yang berorientasi ekspor, pusat berbagai kegiatan *manufacturing final* agroindustri (*packing*), pergudangan dan perdagangan bursa komoditas, pusat jasa perdagangan, asuransi pertanian, kelembagaan keuangan serta pusat berbagai pelayanan pada kawasan tersebut (Rosdiana dkk, 2013).

2. Pusat pertumbuhan sekunder (orde kedua)

Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat pertumbuhan pendukung yang dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Potensi wilayah yang dimiliki dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah. Semakin banyak pusat pertumbuhan akan mampu memberikan efek menetas kebawah atau memberikan dampak pada wilayah sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan struktur kawasan agropolitan, orde kedua disebut sebagai pusat distrik agropolitan. Pusat distrik agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan wilayah seperti pasar grosir, pusat kegiatan agroindustri, produk pertanian jadi dan setengah jadi, pusat kegiatan agribisnis serta pusat pelayanan agroindustri khusus, pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan (Rosdiana dkk, 2013).

3. Pusat pertumbuhan tersier (orde ketiga)

Pusat pertumbuhan tersier adalah daerah belakang (*hinterland*), yang perkembangannya lambat dan menjadi pemasok bahan baku untuk wilayah pusat

pertumbuhan. Selain itu, daerah belakang (*hinterland*) tidak mampu menyediakan pelayanan umum dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya harus pergi ke wilayah lain. Hal tersebut sesuai dengan struktur kawasan agropolitan, orde ketiga disebut pusat satuan kawasan pertanian atau *hinterland*. Pusat satuan kawasan pertanian yang berfungsi sebagai pusat perdagangan lokal seperti pasar harian, pusat pengumpulan komoditas pertanian sebagai bahan baku industri, pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas, pusat pelayanan kebutuhan pemukiman serta koperasi dan informasi pasar produk pertanian bagi kawasan tersebut (Rosdiana dkk, 2013).

Seluruh orde-orde di atas digunakan untuk menentukan pusat pertumbuhan berdasarkan hasil perhitungan nilai skalogram. Apabila hasil perhitungan nilai skalogram menempati peringkat tertinggi, maka daerah tersebut sebagai pusat pertumbuhan. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan nilai skalogram menempati peringkat bawah, maka daerah tersebut sebagai daerah belakang (*hinterland*) (Adisasmita, 2013).

